SUKSESI KEPEMIMPINAN DI KERAJAAN SUNDA PAJAJARAN

Oleh :

Reiza D. Dienaputra

SEMINAR NASIONAL
SASTRA DAN SEJARAH PAKUAN PAJAJARAN
BOGOR 11 - 13 NOPEMBER 1991

SUKSESI KEPEMIMPINAN
DI
KERAJAAN SUNDA PAJAJARAN

oleh

Reiza D. Dienaputra

I. PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri, eksistensi Pajajaran sebagai sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Barat, sampai saat ini masih banyak mengundang silang pendapat. Di antara permasalahan yang masih cukup banyak mengundang silang pendapat tidak lain berkaitan dengan nama Pajajaran sendiri sebagai nama sebuah kerajaan. Benarkah pernah ada kerajaan yang bernama Pajajaran? Kalau ada, bagaimana kaitannya dengan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh? Apakah Kerajaan Pajajaran sendiri identik dengan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh?.

Agar tidak terjebak kepada diskusi panjang yang berkaitan dengan masalah nama, maka perlu kiranya diberi penjelasan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Kerajaan Pajajaran dalam tulisan ini. Kerajaan Pajajaran yang dimaksud dalam tulisan ini tidak lain identik dengan Kerajaan Sunda. Tegasnya, kerajaan yang didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 670 M, setelah pudarnya era

Tarumanegara, dan berakhir pada tahun 1579, dengan Nusiya Mulya sebagai raja terakhir, yang ditandai oleh jatuhnya pusat kerajaan ke tangan pasukan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten.[1]

Sepanjang eksistensinya selama kurang lebih 909 tahun, Kerajaan Sunda Pajajaran pernah mengalami dua kali integrasi politik[2] dengan Kerajaan Galuh. Integrasi politik pertama berlangsung dari tahun 723 M sampai 739 M, dengan tokoh integratornya Sanjaya Harisdharma, yang sekaligus menjadi raja pertama yang memerintah Kerajaan Sunda-Galuh. Di samping Sanjaya, raja lain yang pernah memerintah dalam masa integrasi pertama ini adalah Rakeyan Tamperan.

Integrasi politik kedua berlangsung dari tahun 1482 Masehi sampai 1579 Masehi, dengan tokoh integratornya, Sri Baduga Maharaja. Dalam masa integrasi politik kedua ini, di samping Sri Baduga Maharaja masih ada lima raja lain yang pernah memerintah, termasuk raja terakhir, Nusiya Mulya.

Baik pada integrasi politik pertama maupun kedua, sama-sama ditandai oleh adanya integrasi teritorial, yang berwujud dalam Kerajaan Sunda-Galuh. Adapun perbedaan di antara kedua integrasi politik tersebut terletak dalam bobot ekstensi vertikalnya. Bobot ekstensi vertikal tampak lebih dominan dalam integrasi politik pertama, yang diakibatkan oleh adanya pertentangan hebat antara Sanjaya (elit penguasa) dan para pengikut mantan Raja Purbasora.

Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai sebuah kerajaan

"besar" juga memiliki kerajaan-kerajaan kecil yang berkedudukan sebagai kerajaan bawahan. Kerajaan-kerajaan kecil yang pernah menjadi kerajaan bawahan Pajajaran di antaranya adalah Kerajaan Talaga, Cirebon Girang, dan Kerajaan Tanjung Barat. Khusus Kerajaan Galuh, di samping pernah menjadi kerajaan bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran, juga pernah membawahi Kerajaan Sunda Pajajaran, seperti misal semasa Kerajaan Sunda Pajajaran diperintah Prabu Niskala Wastu Kancana.[3]

Bertolak dari kenyataan tersebut, bila digunakan konsep politik tentang negara, tampaklah bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah negara, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Menurut C.W. Van der Pot[4] dan F.G. Wilson[5], negara sebagai konsep politik bisa terwujud apabila memiliki tiga unsur konstitutif, yang meliputi penduduk, wilayah[6], dan pemerintahan.

Sejalan dengan konsep politik di atas, terlihat bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran memiliki: Penduduk; memiliki pemerintahan, seperti tercermin dari adanya raja-raja beserta aparat pendukungnya; dan memiliki wilayah, seperti tercermin dari terjadinya beberapa kali perpindahan ibukota kerajaan dan terlebih lagi, dengan dimilikinya enam buah pelabuhan laut.[7] Bahkan, lebih dari itu Kerajaan Sunda Pajajaran juga memiliki kedaulatan (sovereignty), seperti tampak secara eksplisit dari adanya perjanjian untuk tidak

saling menyerang dengan Kerajaan Sriwijaya.[8] Dengan demikian, merujuk pada sebutan yang diberikan oleh Jan Wisseman Christie[9] terhadap Kerajaan Mataram I sebagai profil negara klasik di Jawa Tengah, maka Kerajaan Sunda Pajajaran jelaslah dapat pula disebut sebagai profil negara klasik di Jawa Barat yang benar-benar telah berwujud negara menurut konsep politik.

Terlepas dari apakah Kerajaan Sunda Pajajaran dapat dikedepankan sebagai contoh negara klasik di Jawa Barat atau tidak, yang pasti seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia, Kerajaan Sunda Pajajaran pernah diperintah oleh beberapa orang raja. Bahkan, bila dibandingkan dengan jumlah raja yang pernah memerintah kerajaan lain, jumlah raja yang dimiliki Kerajaan Sunda Pajajaran terbilang paling banyak. Sebagai contoh, Kerajaan Majapahit saja yang terkenal besar, "hanya" memiliki raja sebanyak 15 orang.[10]

Melalui telaahan sederhana, tulisan ini akan mencoba membahas masalah suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam menganalisis masalah suksesi kepemimpinan ini, bisa dikatakan sangat sedikit sekali sumber yang bisa "menuntun" penulis agar bisa membahas permasalahan secara komprehensif. Namun demikian, dari sumber yang sedikit itu, diharapkan tetap dapat diperoleh sedikit kejelasan tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran.

II. MODEL SUKSESI KEPEMIMPINAN

Istilah suksesi yang berasal dari akar kata Bahasa Inggris, succesion, memiliki arti penggantian atau perubahan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan suksesi kepemimpinan disini adalah penggantian kepemimpinan dari seorang raja yang digantikan kepada raja yang menggantikan. Adapun yang akan dibahas pada bagian ini lebih ditekankan pada model hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan. Tradisi suksesi kepemimpinan yang turun temurun yang umumnya berlaku di sebuah kerajaan, lewat bahasan ini akan dapat diketahui apakah juga berlangsung di Kerajaan Sunda Pajajaran.

Bila Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda Pajajaran, dianggap sebagai raja pertama Kerajaan Sunda Pajajaran, maka sampai pusat kerajaan dikuasai tentara Kesultanan Banten, setidaknya tercatat ada 40 orang raja yang pernah memerintah Kerajaan Sunda Pajajaran. Dengan jumlah raja sebanyak 40 orang berarti selama kurang lebih sembilan abad di Kerajaan Sunda Pajajaran telah berlangsung 39 kali suksesi kepemimpinan.

Dari 39 kali suksesi kepemimpinan di atas, tercatat ada 14 kali suksesi kepemimpinan yang tidak jelas datanya, sehingga sulit diketahui bagaimana model hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan. Keempatbelas suksesi kepemimpinan itu terjadi pada suksesi

kepemimpinan ke-4, ke-7, ke-9, ke-10, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, ke-21, ke-37, ke-38, dan ke-39.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka jumlah suksesi kepemimpinan yang masih memungkinkan untuk dikaji modelnya tinggal 25 suksesi kepemimpinan. Sisa 25 suksesi kepemimpinan tampaknya masih cukup representatif untuk menggali model suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran.

Dari 25 suksesi kepemimpinan yang diketahui modelnya, setelah diperhatikan secara mendalam, setidaknya ditemukan adanya tujuh model suksesi kepemimpinan yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya. Pertama, model suksesi kepemimpinan dimana hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan merupakan hubungan antara ayah dengan anak. Tegasnya dalam suksesi kepemimpinan model pertama, tahta kerajaan diturunkan langsung kepada anak kandung laki-laki. Jumlah suksesi kepemimpinan model pertama ini tercatat ada 13 buah, yaitu suksesi kepemimpinan ke-2, ke-3, ke-20, ke-22, ke-25, ke-26, ke-27, ke-29, ke-30, ke-33, ke-34, ke-35, dan ke-36 (lihat lampiran I).

Kedua, model suksesi kepemimpinan dimana hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan berupa hubungan antara mertua dan menantu. Dalam suksesi kepemimpinan model kedua ini, raja "terpaksa" menyerahkan

kekuasaan kepada menantunya karena disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak punya anak laki-laki atau meskipun punya anak laki-laki tetapi yang dipandang mampu hanyalah menantunya.

Suksesi kepemimpinan model kedua ini langsung terjadi dalam suksesi pertama, dari Tarusbawa kepada Sanjaya Harisdharma. Tarusbawa "terpaksa" harus menyerahkan kekuasaan kepada Sanjaya karena anak lelaki satu-satunya meninggal sebelum ia turun tahta. Sementara cucu satu-satunya, seorang wanita, yang kemudian menikah dengan Sanjaya. Suksesi kepemimpinan lainnya yang masuk kategori model kedua adalah suksesi kepemimpinan ke-5, ke-6, ke-11, ke-12, ke-23, dan ke-28.

Ketiga, model suksesi kepemimpinan dimana hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan berupa hubungan antara kakak dengan adik kandung. Suksesi kepemimpinan model ini hanya berlangsung sekali yaitu dalam suksesi kepemimpinan ke 31, dari Prabu Linggabuana kepada Hiyang Bunisora atau Sang Prabhu Bhumisura.

Keempat, model suksesi kepemimpinan yang diturunkan oleh raja kepada adik ipar. Suksesi kepemimpinan model keempat ini terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-8.

Kelima, model suksesi kepemimpinan yang diwariskan oleh raja kepada pamannya. Suksesi kepemimpinan model ini hanya berlangsung sekali yakni dalam suksesi kepemimpinan ke-13.

Keenam, model suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada keponakan. Suksesi kepemimpinan model keenam ini terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-32.

Ketujuh, model suksesi kepemimpinan dimana hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan terbilang unik bila dibanding dengan model-model sebelumnya, yakni berupa hubungan antara raja pusat dengan raja daerah. Suksesi kepemimpinan model ini terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-24, yaitu dari Prabu Darmakusuma kepada Prabu Guru Darmasiksa Paramarta Mahapurusa. Sebenarnya, suksesi kepemimpinan model ketujuh ini terjadi lagi dalam suksesi kepemimpinan ke-25, tetapi karena secara genealogis hubungan antara raja yang digantikan dengan raja yang menggantikan juga merupakan hubungan antara ayah dengan anak kandung, maka bobotnya menjadi kurang murni bila harus tetap dimasukan dalam model ketujuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas, tampaklah bahwa suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran umumnya terbatas pada keluarga kerajaan saja, dengan model suksesi kepemimpinan yang turun temurun murni, dalam arti diturunkan langsung oleh raja kepada anak kandung laki-laki, sebagai model suksesi kepemimpinan yang paling banyak terjadi. Model pewaris suksesi kepemimpinan selanjutnya adalah anggota keluarga kerajaan terdekat, seperti menantu, adik kandung, adik ipar, paman, dan keponakan.

Di luar itu, suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran juga ditandai oleh adanya mantan raja daerah yang kemudian menjadi raja pusat.[11] Kenyataan ini secara implisit bisa dijadikan petunjuk awal tentang kemungkinan dianutnya bentuk negara federal oleh Kerajaan Sunda Pajajaran.

Adanya fakta bahwa mayoritas model suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran adalah turun temurun murni kiranya bisa dikedepankan sebagai salah satu "penentu" yang telah menjadikan Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai kerajaan Hindu-Budha di Indonesia yang paling panjang usianya. Sebagaimana diungkapkan Bertrand Russell,[12] model suksesi kepemimpinan yang turun temurun merupakan cara termudah yang bisa ditempuh untuk menghindari timbulnya konflik dalam menentukan pengganti raja. Dengan kata lain, pendapat Russel itu bisa pula diartikan bahwa suksesi kepemimpinan yang turun temurun merupakan cara terbaik untuk menghindarkan kerajaan dari kemungkinan kehancuran yang cepat.

III. FAKTOR PENYEBAB SUKSESI KEPEMIMPINAN

Hampir sama halnya dengan model suksesi kepemimpinan, dari 39 kali suksesi kepemimpinan yang pernah terjadi di Kerajaan Sunda Pajajaran, setidaknya ada 15 suksesi kepemimpinan yang tidak jelas faktor penyebabnya.

Kelimabelas suksesi kepemimpinan yang tidak jelas faktor penyebabnya itu terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-1, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-10, ke-12, ke-13, ke-15, ke-16, ke-20, ke-23, ke-25, dan ke-30.

Sementara itu, dari 24 kali suksesi kepemimpinan yang diketahui faktor penyebabnya, bila dilakukan pemilahan, dapatlah dikemukakan adanya enam jenis faktor penyebab yang telah melatarbelakangi timbulnya suksesi kepemimpinan. Pertama, faktor usia. Dalam kategori ini, suksesi kepemimpinan terjadi karena raja yang memerintah meninggal dunia. Suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh meninggalnya raja atau oleh faktor usia ini tercatat ada 15 kali suksesi kepemimpinan. Kelimabelas suksesi kepemimpinan itu terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-14, ke-18, ke-19, ke-21, ke-22, ke-24, ke-25, ke-26, ke-27, ke-28, ke-29, ke-32, ke-33, ke-35, dan ke-36.

Di antara raja-raja yang turun tahta karena faktor usia ini, setidaknya ada empat orang raja yang terbilang berhasil dalam menjalankan pemerintahannya. Keempat raja tersebut adalah Prabu Langlangbumi (raja ke-22), Prabu Guru Darmasiksa Sang Paramarta Mahapurusa (raja ke-25), Prabu Nisakala Wastukancana (raja ke-33), dan Sri Baduga Maharaja (raja ke-35).

Satu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, meskipun masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja termasuk yang paling singkat di antara keempat raja itu, tetapi

justru ia boleh dikatakan merupakan tokoh yang paling terkenal dan bahkan mungkin pula yang paling berhasil. Masih menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah penyebab kepopuleran Sri Baduga Maharaja yang demikian besar, salah satunya dikarenakan ia merupakan tokoh integrator dalam integrasi politik kedua? Untuk diketahui, berkat adanya integrasi politik kedua yang berlangsung selama kurang lebih 97 tahun, pada akhirnya menempatkan Sri Baduga Maharaja sebagai raja Sunda Pajajaran yang memerintah paling lama selama masa integrasi politik kedua berlangsung. Bahkan, selama terjadinya dua kali integrasi politik, yakni selama kurang lebih 39 tahun.

Sebaliknya, meskipun masa pemerintahan Prabu Guru Darmasiksa terhitung paling lama dibanding masa pemerintahan keempat raja lainnya yang berhasil, bahkan di antara semua raja yang pernah memerintah Kerajaan Sunda Pajajaran, tetapi ia justru merupakan raja yang paling tidak populer. Hal ini setidaknya tampak dari sangat sedikitnya sumber-sumber yang mengangkat masa pemerintahannya ke permukaan.

Bila diadakan pembahasan lebih mendalam menyangkut faktor penyebab suksesnya pemerintahan keempat raja di atas, maka faktor penyebab terpenting yang bisa dikemukakan adalah karena raja-raja tersebut selama menjalankan roda pemerintahannya senantiasa memegang teguh kaidah-kaidah moral. Hal itu di antaranya berwujud dalam kepatuhan

terhadap perbuatan utama, rajin mendirikan tempat-tempat suci dan pendidikan, sempurna dalam menjalankan ibadah agama, serta setia kepada kebiasaan dan keaslian leluhur.[13] Dilihat dari kitab Sanghyang Siksakanda Ng Karesian, keberhasilan pemerintahan keempat raja tersebut tidak lain karena mereka mampu memelihara dasaprebakti[14] dan dasakreta[15] dengan baik.

Kedua, suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap kaidah moral. Suksesi kepemimpinan yang diakibatkan adanya pelanggaran raja terhadap kaidah moral ini terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-11, ke-34, ke-37, ke-38, dan ke-39. Dua di antara bentuk konkrit pelanggaran itu dikarenakan raja menikahi wanita larangan.[16] Kedua raja yang menikahi wanita larangan tersebut adalah Sang Prabu Dewa Niskala (raja ke-34) dan Ratu Sakti Sang Mangabatan (raja ke-38).

Melihat kondisi tersebut, tampak secara eksplisit betapa kaidah moral memegang peranan sangat penting dalam menentukan kelanggengan pemerintahan seorang raja. Dengan demikian, tepatlah pula kiranya bila Bertrand Russell[17] mengatakan bahwa kaidah moral yang berlaku di masa lalu pada dasarnya merupakan lembaga sosial yang analog dengan hukum, memiliki kekuatan memaksa, sehingga bisa juga dikatakan sebagai moralitas positif.

Ketiga, Suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh adanya kudeta.[18] Suksesi kepemimpinan karena kudeta ini

terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-3. Kudeta yang terjadi semasa pemerintahan Rakeyan Tamperan ini dilakukan oleh Sang Manarah pada tahun 739M.

Pasca berakhirnya kudeta yang menewaskan Rakeyan Tamperan hampir saja melahirkan perang saudara, setelah Sanjaya mengerahkan pasukannya dari Kerajaan Medang dalam jumlah besar untuk menumpas para pelaku kudeta, sekaligus menyelamatkan cucunya, Rakeyan Banga. Namun demikian, berkat turun tangannya Sang Demunawan sebagai mediator, perang saudara berhasil dihindarkan, yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara Sanjaya dan Manarah untuk membagi kembali wilayah Kerajaan Sunda-Galuh. Sebagai raja di Kerajaan Sunda diangkat Rakeyan Banga, sementara sebagai raja di Kerajaan Galuh diangkat Sang Manarah.

Langkah pengamanan selanjutnya yang ditempuh adalah dengan mengawinkan dua orang kakak beradik cicit Demunawan, yakni Kancanasari dan Kancanawangi, dengan Sang Manarah dan Rakeyan Banga. Perkawinan antara Manarah dan Kancanawangi dilakukan tahun 739M, sedangkan perkawinan antara Banga dan Kancanasari baru dilakukan tahun 743M.[19]

Bila dibahas lebih lanjut peristiwa kudeta tahun 739M, tampaklah secara eksplisit bahwa kudeta tersebut secara tidak langsung sebenarnya merupakan "warisan" konflik keluarga yang pernah terjadi di Kerajaan Galuh, yang juga ditandai oleh adanya kudeta berdarah. Sebelum kudeta tahun 739M, di Kerajaan Galuh pernah terjadi dua

kali peristiwa kudeta. Masing-masing dilakukan oleh Rakeyan Purbasora (buyut Sang Manarah) terhadap Sang Sena (ayah Sanjaya) pada tahun 716M, dan oleh Sanjaya (ayah Tamperan) terhadap Purbasora tahun 723M.

Keempat, suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh pindahnya raja yang tengah memerintah ke kerajaan lain. Suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh faktor yang "unik" ini terjadi semasa pemerintahan Sanjaya (raja ke-2). Setelah memerintah Kerajaan Sunda Pajajaran selama kurang lebih sembilan tahun, sejak tahun 732M Sanjaya pindah ke Kerajaan Medang untuk melanjutkan kekuasaan ibunya.[20]

Sebagai konsekuensi dari suksesi kepemimpinan yang kurang lazim ini, Sanjaya "harus" menyerahkan sebagian wilayah kerajaannya kepada Sang Demunawan atau Sang Sowokarma atau Sang Karmasaya.[21] Wilayah baru yang dilepaskan Sanjaya selanjutnya menjadi Kerajaan Saunggalah, sementara wilayah intinya tetap menjadi milik dinasti Sanjaya.

Kelima, suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja. Suksesi kepemimpinan karena pembunuhan ini terjadi dalam suksesi kepemimpinan ke-9 dan Ke-31.

Dalam suksesi kepemimpinan ke-9, raja dibunuh oleh seorang mentri di dalam lingkungan kerajaan. Pembunuhan yang terjadi terhadap Sang Prabu Darmaraksabuwana atau Arya

Kedaton ini di antaranya disebabkan oleh ketidaksenangan pelaku pembunuhan atas asal muasal raja. Arya Kedaton yang naik tahta menggantikan Rakeyan Wuwus berasal dari Galuh.

Dalam suksesi kepemimpinan ke-31, raja terbunuh sewaktu terjadi perang Bubat pada tahun 1357. Meskipun perang Bubat ini telah membawa malapetaka besar bagi Prabu Maharaja Linggabuwana dan seluruh anggota rombongannya, termasuk putrinya, Dyah Pitaloka, di kemudian hari perang Bubat juga melahirkan blessing in disguise. Berkat perang Bubat yang akhirnya menimbulkan penyesalan mendalam dan rasa segan Raja Hayam Wuruk terhadap Kerajaan Sunda Pajajaran, sewaktu Kerajaan Majapahit mengembangkan hegemoninya ke berbagai wilayah di dalam dan di luar Indonesia, Kerajaan Sunda Pajajaran ternyata sama sekali tidak "disentuh". Dari kenyataan ini pulalah tampak secara implisit bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran memang memiliki kedaulatan, baik ke luar maupun ke dalam.

Berangkat dari apa yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa penyebab timbulnya suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran pada umumnya adalah karena faktor usia raja semata. Dengan kata lain, raja-raja di Kerajaan Sunda Pajajaran umumnya memerintah sampai akhir hayatnya.

Hal yang "menarik" berkaitan dengan kajian terhadap faktor penyebab suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran adalah ditemukannya bukti bahwa suksesi kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran mengenal pula kudeta kekuasaan. Terlepas dari kemungkinan bahwa suksesi

kepemimpinan yang diakibatkan oleh kudeta ini merupakan "warisan" Kerajaan Galuh, satu hal yang pasti bahwa ternyata suksesi kepemimpinan melalui cara kudeta bukanlah merupakan monopoli kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sementara itu, suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh pindahnya raja yang berkuasa ke kerajaan lain, sejauh yang penulis ketahui merupakan milik khas Kerajaan Sunda Pajajaran. Tegasnya, suksesi kepemimpinan yang diakibatkan oleh pindahnya raja bisa dikatakan belum pernah diketemukan terjadi di luar Kerajaan Sunda Pajajaran.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan dimuka, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Kerajaan Sunda Pajajaran adalah sebuah profil negara klasik di Jawa Barat yang telah memenuhi kesemua unsur konstitutif bagi terwujudnya sebuah negara, berdasarkan konsep politik, dengan Tarusbawa sebagai pendiri, sekaligus raja pertama, dan Nusiya Mulya, sebagai raja terakhir.

Kedua, dari 25 suksesi kepemimpinan yang diketahui modelnya serta pernah terjadi di Kerajaan Sunda Pajajaran, diketemukan adanya tujuh model suksesi kepemimpinan yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya. Ketujuh model suksesi kepemimpinan tersebut bila disederhanakan lebih lanjut bisa dibuat menjadi tiga model suksesi kepemimpinan:

Model suksesi kepemimpinan yang diturunkan raja kepada anak kandung laki-laki; model suksesi kepemimpinan yang diwariskan oleh raja kepada kerabat keluarga kerajaan di luar anak kandung laki-laki; serta model suksesi kepemimpinan yang diturunkan raja kepada seseorang yang bukan berasal dari kerabat keluarga kerajaan.

Ketiga, dari 24 suksesi kepemimpinan yang diketahui faktor penyebabnya, maka faktor penyebab umum yang telah melatarbelakangi timbulnya suksesi kepemimpinan adalah faktor usia raja semata. Sementara kudeta juga merupakan faktor penyebab suksesi yang ternyata pernah dikenal Kerajaan Sunda Pajajaran.

Keempat, dari hasil kajian gabungan terhadap "temuan" yang menyangkut model dan faktor penyebab suksesi kepemimpinan, diperoleh beberapa gambaran menarik, sebagai berikut: Dari 13 model suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada anak kandung, delapan suksesi disebabkan oleh faktor usia raja, satu suksesi disebabkan oleh pelanggaran raja terhadap kaidah moral, satu suksesi disebabkan oleh kudeta, dan dua suksesi tidak diketahui faktor penyebabnya; dari 7 model suksesi kepemimpinan yang diturunkan raja kepada menantu, satu suksesi disebabkan faktor usia, satu suksesi lagi disebabkan pelanggaran raja terhadap kaidah moral, sedangkan sisa lima suksesi tidak diketahui faktor penyebabnya; dari satu model suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada adik kandung faktor penyebabnya adalah

karena raja terbunuh; dari satu model suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada adik ipar, faktor penyebabnya tidak diketahui; dari satu suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada paman, faktor penyebabnya juga tidak diketahui; dari satu model suksesi kepemimpinan yang diturunkan raja kepada keponakan penyebabnya adalah faktor usia; dari satu model suksesi kepemimpinan yang diturunkan kepada mantan raja daerah penyebabnya juga faktor usia; sementara dari 14 suksesi kepemimpinan yang tidak diketahui modelnya, empat suksesi disebabkan oleh faktor usia, tiga suksesi disebabkan oleh pelanggaran raja terhadap kaidah-kaidah moral, satu suksesi disebabkan raja terbunuh, dan enam suksesi tidak diketahui faktor penyebabnya. (untuk lebih jelasnya, lihat lampiran II).

Melihat hasil kajian gabungan diatas, maka dari 39 suksesi kepemimpinan yang pernah terjadi di Kerajaan Sunda Pajajaran, yang benar-benar tidak diketahui baik model maupun faktor penyebabnya "hanya" 6 suksesi kepemimpinan. Keenam suksesi kepemimpinan tersebut adalah suksesi kepemimpinan ke-4, ke-7, ke-10, ke-15, ke-16, dan ke-17.

Catatan

1. Dilihat dari kerangka kepentingan Islamisasi, runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran memiliki arti yang sangat strategis, karena kerajaan tersebut merupakan kerajaan Hindu-Budha terakhir di Pulau Jawa yang berhasil ditaklukan pasukan Islam. Lihat M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, Terjemahan oleh Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 57.

2. Integrasi politik adalah suatu proses integrasi yang mengandung bobot politik. Integrasi politik ini ekstensinya bisa vertikal, yaitu antara elit dan massa, bisa pula horizontal, yaitu yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan teritorial. Dengan demikian, dalam integrasi yang ekstensinya horizontal ditandai oleh adanya penyatuan wilayah. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, Integrasi Politik di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 4-5.

3. Edi S. Ekadjati, "Sejarah Galuh dalam Berbagai Sumber", dalam Viviane Sukanda Tessier dkk. (editor), Proseedings Seminar Sejarah dan Budaya II Tentang Galuh, Tasikmalaya: Lembaga Pengkajian dan Penelitian Yayasan Universitas Siliwangi, 1990, hlm. 276.

4. C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staats-recht, 1950, hlm. 4.

5. F.G. Wilson, The Elements of Modern Politics; Introduction to Political Science, New York: Mc Graw-Hill, 1926, hlm.60.

6. K.S. Carlston, Law and Structures of Social Action, 1956, hlm. 53, untuk maksud yang sama menggunakan istilah perbatasan (boundary), dengan alasan bahwa batas wilayah suatu negara pada kenyataannya lebih mempengaruhi kelanjutan negara itu dibandingkan wilayah itu sendiri.

7. Keenam buah pelabuhan laut yang dimiliki Kerajaan Sunda Pajajaran adalah Kalapa, Banten, Pontang, Tamgara, Cigede, dan Cimanuk. Di antara keenam pelabuhan itu, Pelabuhan Kalapa merupakan pelabuhan terpenting dan terbaik yang dimiliki Kerajaan Sunda Pajajaran. Lihat Armando Cortesao dalam Amelia, "Perdagangan Kuna Masa Galuh Berdasarkan Analisis Mata Uang Logam Situs Talaga", dalam Viviane Sukanda Tessier dkk. (Editor), Op.Cit., hlm. 268-269.

8. Perjanjian untuk tidak saling menyerang ini ditandatangani tanggal 14 Paro-terang, bulan Magha, tahun 607 Saka atau tanggal 16 Januari 686, oleh Tarusbawa dan Sri Maharaja Jayanasa (raja Sriwijaya). Setelah penandatanganan piagam perjanjian ini, masing-masing kerajaan kemudian saling mengadakan pertukaran duta (sekarang mungkin identik dengan duta besar). Lihat Atja dan Edi S. Ekadjati, Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara 1.1: Suntingan Naskah dan Terjemahan, Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 229-230.

9. Jan Wisseman Christie, "Raja dan Rama: Negara Klasik di Jawa Masa Awal", dalam Lorraine Gesick (Penyunting), Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan: Esai-Esai tentang Negara-negara Klasik di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, hlm. xiv dan 1-28.

10. Slamet Muljana, Runtuhnja Keradjaan Hindu-Djawa dan Timbulnja Negara-Negara Islam di Nusantara, Djakarta: Bhratara, 1968, hlm. 44.

11. Jan Wisseman Christie, Op.Cit., hlm. 24, dalam konsep politik Jawa, daerah pingggir, tempat dimana raja-raja daerah memerintah disebut mancanegara, sedangkan daerah inti, tempat dimana pusat kerajaan berada, disebut nagaragung.

12. Bertrand Russell, Power: A New Social Analysis, Terjemahan oleh Hasan Basari, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 54.

13. Atja dan Saleh Danasasmita, Carita Parahiyangan: (Transkripsi, Terjemahan, dan Catatan), Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981[a]. hlm. 34-36.

14. Dasaprebakti adalah sepuluh tingkat kesetiaan, dimana satu di antaranya berupa kesetiaan raja terhadap dewata. Lihat Atja dan Saleh Danasasmita, Sanghyang Siksakanda Ng Karesian, (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi), Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981[b], hlm. 54.

15. Dasakreta artinya sepuluh kesejahteraan. Dasakreta ini bisa tercapai apabila mampu memanfaatkan dan menjaga kesepuluh indra (dasaindria) secara sempurna. Lihat Atja dan Saleh Danasasmita, Ibid., hlm. 53.

16. Wanita yang dikategorikan wanita larangan atau estri larangan adalah Wanita yang telah bertunangan atau telah menerima lamaran untuk diperistri. Lihat Atja dan Saleh Danasasmita, Ibid., hlm. 54-55. Atja dan Saleh Danasasmita, Op.Cit., 1981[a], hlm. 47, setelah terjadinya perang bubat, wanita yang berasal dari lingkungan Kerajaan Majapahit juga dimasukkan dalam wanita larangan, sehingga tabu untuk dinikahi.

18. Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 7, berdasarkan kutipan dari Webster's Third International Dictionary, mendefinisikan kudeta sebagai suatu gerakan yang mendadak dan menentukan (decisive) di dalam politik, dengan sasaran utama untuk mengubah atau mengganti suatu pemerintah secara illegal atau dengan menggunakan kekerasan fisik.

17. Bertrand Russell, Op.Cit., hlm. 174.

19. Atja dan Saleh Danasasmita, Op.Cit., 1981[a], hlm. 43-44.

20. Ibid., hlm. 42.

21. Atja dan Saleh Danasasmita, Amanat Dari Galunggung: (Kropak 632 dari Kabuyutan Ciburuy, Bayongbong-Garut), Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981[c], hlm. 51.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia. 1990. "Perdagangan Kuno Masa Galuh: Beberapa Analisis Mata Uang Logam Situs Talaga", dalam Viviane Sukanda - Tessier (Editor), Proseedings Seminar Sejarah Dan Budaya II Tentang Galuh. Tasikmalaya: Lembaga Pengkajian dan Penelitian Yayasan Universitas Siliwangi.

Atja. 1968. Tjarita Parahijangan. Bandung: Jajasan Kebudayaan Nusalarang.

_____ (Editor). 1975. Sejarah Jawa Barat Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam. Bandung: Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat.

Atja dan Ayatrohaedi. 1986. Nagarakretabhumi 1.5: Karya Kelompok Kerja Di Bawah Tanggungjawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Atja dan Saleh Danasasmita. 1981[a]. Carita Parahyangan: Transkripsi, Terjemahan dan Komentar. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

_____. 1981[b]. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

_____. 1981[c]. Amanat Dari Galunggung: (Kropak 632 Dari Kabuyutan Ciburuy, Bayongbong-Garut. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

Atja dan Edi S. Ekadjati. 1987. Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara 1.1: Suntingan Naskah dan Terjemahan. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Christie, Jan Wisseman. 1989. "Raja dan Rama: Negara Klasik di Jawa". dalam Lorraine Gesick, Pusat, Simbol dan Hirarki Kekuasaan: Esai-esai Tentang Negara-negara Klasik di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ekadjati, Edi S.. 1990. "Sejarah Galuh Dalam Berbagai Sumber", dalam Viviane Sukandar - Tessier (Editor), Proseedings Seminar Sejarah Dan Budaya II Tentang

Galuh. Tasikmalaya: Lembaga Pengkajian dan Penelitian Yayasan Universitas Siliwangi.

Muhaimin, Yahya A.. 1982. Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muljana, Slamet. 1968. Runtuhnja Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnja Negara Islam di Nusantara. Djakarta: Bhratara.

Ricklefs, M.C.. 1991. A History of Modern Indonesia. Terjemahan oleh Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Russell, Bertrand. 1988. Power: A New Social Analysis. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Wilson, F.G.. 1926. The Elements of Modern Politics: Introduction to Political Science. New York: Mc Graw-Hill.

Lampiran I

BAGAN MODEL DAN FAKTOR PENYEBAB

SUKSESI KEPEMIMPINAN

DI KERAJAAN SUNDA PAJAJARAN

---

1. Sri Maharaja Tarusbawa
(670-723M)

M ! (?)

2. Sanjaya Sang Harisdharma
(Rakeyan Jambri)
(723-732M)

A ! (pk)

3. Rakeyan Tamperan Barmawijaya
(732-739)

A ! (k)

4. Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulya
(Rakeyan Banga)
(739-766M)

? ! (?)

5. Sang Prabu Hulukujang
(Rakeyan Medang)
(766-783M)

M ! (?)

6. Sang Prabu Giliwengsi
(Rakeyan Ujung Kulon)
(783-795M)

M ! (?)

7. Sang Prabu Pucukbumi Dameswara
(Rakeyan Diwus)
(795-819M)

? ! (?)

8. Sang Prabu Gajah Kulon
(Rakeyan Wuwus)
(819-891M)

AI ! (?)

9. Sang Prabu Darmaraksabuana
(Arya Kedaton)
(891-895M)

9. Sang Prabu Darmaraksabuana
(891-895M)

? ! (t)

10. Prabu Dewageng
(Sang Windusakti)
(895-913M)

? ! (?)

11. Sang Prabu Pucukwesi
(Rakeyan Kemuninggading/ Sang Lumahing Hujung Cariang)
(913-916M)

M ! (1km)

12. Prabu Wanayasa
(Rakeyan Jayagiri)
(916-942M)

M ! (?)

13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa
(Sanghyang Watuageng)
(942-954M)

P ! (?)

14. Prabu Limbur Kancana
(Sang Lumahing Galuh)
(954-964M)

? ! (u)

15. Prabu Munding Ganawirya Tapakmanggala Jayasatru
(Rakeyan Sunda Sambawa)
(964-973M)

? ! (?)

16. Sang Prabu Walunggadung Jayawiryagopara
(Rakeyan Jayagiri)
(973-989M)

? ! (?)

17. Sang Prabu Brajawisesa
(Rakeyan Gendang)
(989-1012M)

? ! (?)

18. Prabu Dewa Sanghyang
(1012-1019M)

? ! (u)

19. Prabu Sanghyang Ageng
(1019-1030M)

19. Prabu Sanghyang Ageng
(1019-1030M)

? ! (u)

20. Prabu Ditiya Maharaja
(Prabu Ditiya Maharaja Sri Jayabhupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuwanamandaleswaranindita Harogowardhana Wikramottunggadewa)
(1030-1042M)

A ! (?)

21. Prabu Darmaraja Jayamanahen Wisnumurti Sakala Sundabuwana
(Sang Lumahing Winduraja)
(1042-1065M)

? ! (u)

22. Prabu Langlangbumi
(Sang Lumahing Kreta)
(1065-1155M)

A ! (u)

23. Sang Prabu Menakluhur Langlangbumisutah
(Rakeyan Jayagiri)
(1155-1157M)

M ! (?)

24. Prabu Darmakusuma
(Sang Lumahing Winduraja)
(1157-1175M)

MRD ! (u)

25. Prabu Guru Darmasiksa Paramarta Mahapurusa
(Prabu Sanghyang Wisnu/ Sang Rakeyan Darmasiksa)
(1175-1297M)

A ! (u)

26. Sang Prabu Ragasuci
(Rakeyan Saunggalah/ Sang Lumahing Taman)
(1297-1303M)

A ! (u)

27. Prabu Citraganda
(Sang Lumahing Tanjung)
(1303-1311M)

A ! (u)

28. Prabu Linggadewata
(Sang Lumahing Kikis)
(1311-1333M)

28. Prabu Linggadewata
(1311-1333M)

M ! (u)

29. Prabu Ajiguna Linggawisesa
(Sang Lumahing Kiding)
(1333-1340M)

A ! (u)

30. Prabu Ragamulya Luhur Prabawa
(Sang Ajikolot)
(1340-1350M)

A ! (?)

31. Prabu Maharaja Linggabuwana
(Prabu Wangi/ Sang Lumahing Bubat)
(1350-1357M)

AK ! (t)

32. Sang Prabu Bhumisura
(Hiyang Bunisora)
(1357-1371M)

KNK ! (u)

33. Prabu Niskala Wastu Kancana
(Prabu Resibuwana Tunggaldewa)
(1371-1475M)

A ! (u)

34. Sang Prabu Dewa Niskala
(Ningrat Kancana)
(1475-1482M)

A ! (lkm)

35. Sri Baduga Maharaja
(Prabu Siliwangi/ Sang Ratu Jaya Dewata)
(1482-1521M)

A ! (u)

36. Sang Prabu Surawisesa
(Ratu Sangiang)
(1521-1535M)

A ! (u)

37. Sang Prabu Dewatabuwana
(Prabu Ratu Dewata)
(1535-1543M)

? ! (lkm)

38. Sang Prabu Ratu
(Ratu Sakti Sang Mangabatan)
(1543-1551M)

38. Sang Prabu Ratu
(Ratu Sakti Sang Mangabatan)
(1543-1551M)

? ! (lkm)

39. Sang Prabu Nilakendra
(Sang Lumahing Majaya)
(1551-1567M)

? ! (lkm)

40. Sang Ratu Ragamulya
(Prabu Surya Kancana/ Nusiya Mulya)
(1567-1579M)

Keterangan:

A = Anak Kandung Laki-laki
M = Menantu
AK = Adik Kandung (Laki-laki)
AI = Adik Ipar
P = Paman
KNK = Keponakan
MRD = Mantan Raja Daerah
? = Tidak diketahui Model Suksesi Kepemimpinannya

(u) = usia
(lkm)= langgar kaidah moral
(t) = terbunuh
(pk) = pindah kerajaan
(k) = kudeta
(?) = tidak diketahui faktor penyebab suksesi kepemimpinannya

Catatan:

Bagan di atas, diolah berdasarkan data-data yang diperoleh dari dua buah sumber acuan utama:

a. Atja dan Ayatrohaedi. 1986. Nagarakretabhumi 1.5: Karya Kelompok Kerja di Bawah Tanggungjawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda.

b. Atja dan Saleh Danasasmita. 1981[a]. Carita Parahyangan: (Transkripsi, Terjemahan dan Catatan). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

DIAGRAM KETERKAITAN ANTARA
MODEL SUKSESI KEPEMIMPINAN DAN FAKTOR PENYEBAB SUKSESI KEPEMIMPINAN
DI KERAJAAN SUNDA PAJAJARAN

MODEL SUKSESI KEPEMIMPINAN	FAKTOR PENYEBAB SUKSESI KEPEMIMPINAN						JUMLAH
	(u)	(lkm)	(t)	(k)	(pk)	(?)	
A	(8)	(1)	–	(1)	(1)	(2)	(13)
M	(1)	(1)	–	–	–	(5)	(7)
AK	_	_	(1)	–	–	–	(1)
AI	–	–	–	–	–	(1)	(1)
P	–	–	–	–	–	(1)	(1)
KNK	(1)	–	–	–	–	–	(1)
MRD	(1)	–	–	–	–	–	(1)
?	(4)	(3)	(1)	–	–	(6)	(14)
J U M L A H	(15)	(5)	(2)	(1)	(1)	(15)	(39)